ABSTRAK

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan analisis yuridis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif kebijakan hukum pidana dan untuk mengetahui dan menjelaskan konsep kebijakan dari penerapan pengaturan hukum yang hidup dalam Masyarakat di masa yang akan datang. Adapun rumusan masalah adalah 1) Bagaimana analisis yuridis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif kebijakan hukum pidana? dan 2) Bagaimanakah konsep kebijakan dari penerapan pengaturan hukum yang hidup dalam Masyarakat di masa yang akan datang?. Tipe penelitian yakni yuridis normatif yang menggunakan pendekatan antara lain: pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sebelum disahkannya kuhp baru, pada kuhp yang lama tidak secara spesifik mengatur hukum adat, namun, banyak peraturan-peraturan yang menghormati dan mengakui keberadaan hukum adat. Setelah disahkannya KUHP Baru terdapat perluasan asas legalitas, yaitu asas legalitas formil yang berfokus pada kepastian hukum dan asas legalitas materil yang berfokus pada keadilan hukum. Keseimbangan kepastian hukum dan keadilan hukum sangat perlu ditegakkan demi kepentingan masyarakat Indonesia dan arah kebijakan hukum pidana dalam formulasi yang ada dalam masyarakat sudah sesuai dengan sistem pluralisme hukum. 2) Secara konseptual, implementasi kebijakan dari penerapan pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat masih harus menghadapi tantangan karena terdapat kekaburan hukum dalam peraturan hukum yang hidup dalam masyarakat serta pemahaman yang belum merata di kalangan masyarakat terhadap formulasi hukum yang hidup dalam masyarakat yang diterapkan dalam KUHP yang baru.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Hukum Yang Hidup, Kebijakan Hukum Pidana.*